



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : R. SYARIF HIDAYAT
2. Jabatan : DIREKTUR INTERDIKSI NARKOTIKA
3. NHK : 63505

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.385.000.000

1. Bangunan Seluas 23 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
2. Bangunan Seluas 22.26 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m2/76 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
5. Tanah Seluas 169 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
6. Tanah Seluas 184 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
7. Tanah Seluas 158 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
8. Tanah Seluas 203 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 814.000.000

1. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000



3. MOBIL, TOYOTA LANDCRUISER Tahun 1980, HASIL SENDIRI  
Rp. 55.000.000
4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
320.000.000
5. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
330.000.000

<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	144.974.370
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	3.343.974.370
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	---
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	3.343.974.370

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.